

L O K A K A R Y A

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN

EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB

BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

PENGALAMAN EMPIRIK KERJASAMA IPB DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA BAGI PEMBANGUNAN

Oleh

BAPPEDA KABUPATEN DT II CIREBON

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PENGALAMAN EMPIRIK KERJASAMA IPB DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA
BAGI PEMBANGUNAN 1)

Oleh

BAPPEDA KABUPATEN DT II. CIREBON

PENDAHULUAN

1. Dasar Kerjasama

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Institut Pertanian Bogor secara resmi dilakukan sejak ditanda-tanganinya piagam kerjasama pada tanggal 1 Nopember 1972 masing-masing oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon R.A. Soetisna dan Rektor IPB Prof.Dr.Ir. AM. Satari dan berlangsung hingga sekarang.

Kerjasama diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan manfaat kedua belah pihak secara timbal balik atas dasar sama derajat, saling menghormati serta dalam batas-batas kemampuan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu tugas utama kedua belah pihak.

Adanya kepentingan dan kesamaan tujuan antara kedua belah pihak, memberikan motivasi yang melahirkan kerjasama tersebut.

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21-22 Desember 1988, di LPPM IPB Bogor.

Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Cirebon menyadari bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, tidak cukup hanya mengandalkan kepada kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, tanpa didukung oleh semangat, motivasi, kemampuan, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu merubah dan mendayagunakan potensi pembangunan yang dimiliki kearah tujuan yang diinginkan.

Selain itu, pembangunan yang merupakan proses perubahan kearah tercapainya tujuan itu, jelas memerlukan perencanaan dan pelaksanaan terpadu, organisasi dan lembaga yang memadai dan besarnya partisipasi seluruh masyarakat, agar dapat mencapai hasil optimal, efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan berkemampuan sesuai dengan perkembangan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian keberhasilan pembangunan sangat tergantung kepada kualitas manusianya sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.

Memperhatikan kepada dasar perekonomian daerah Kabupaten Cirebon yang masih bersifat agraris (baik dilihat dari potensi wilayah pertanian yang luas, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB yang terbesar, maupun komposisi mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian yang tergolong mayoritas), maka hubungan kerjasama dengan IPB sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang ekonomi

pertanian dinilai sangat tepat. Melalui kerjasama dengan IPB diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia atau penduduk Kabupaten Cirebon sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan.

Sementara itu bagi IPB melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), dalam rangka pelaksanaan Tri Dharmanya, berkepentingan pula untuk memperkenalkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang dasar ekonominya masih agraris, sekaligus sebagai pengkajian ulang ataupun penggalian metoda-metoda baru yang tepatguna, berdaya guna dan berhasil guna bagi percepatan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pada umumnya, dan para petani pada khususnya.

Dengan demikian tampaklah adanya kepentingan dan tujuan yang sama dalam menjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan IPB.

2. Maksud dan tujuan makalah

Selain untuk memenuhi permintaan Panitia Lokakarya PPM dan Evaluasi KKN tertanggal 21-22 Desember 1988, makalah ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Cirebon dengan IPB melalui berbagai kegiatan bersama.

Adapun tujuannya tiada lain, agar dengan gambaran pelaksanaan Piagam Kerjasama tersebut, kiranya dapat dievaluasi faktor-faktor baik yang memperlancar maupun yang menghambat pelaksanaan kerjasama tersebut, untuk kemudian diambil langkah-langkah perbaikan bagi pemantapan dan peningkatan kerjasama tersebut dimasa-masa mendatang.

3. Sistimatika

Makalah ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Tinjauan Pelaksanaan Terhadap Naskah Piagam Kerjasama.
- Bab III : Pengisian, Hasil dan Manfaat Pelaksanaan Kerjasama.
- Bab IV : Kesimpulan dan Usul-usul/Saran-saran.
- Bab V : Penutup

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PIAGAM KERJASAMA

1. Tujuan

Sebagaimana telah disinggung pada Bab I, bahwa lahirnya Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Cirebon dengan IPB, karena adanya kesamaan kepentingan dan tujuan bagi kedua belah pihak. Tujuan daripada kerjasama seperti yang disebutkan dalam Piagam Kerjasama, pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Daerah Tk II Cirebon dan mengabdikan ilmu serta praktek pertanian bagi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan potensi, kondisi serta dasar perekonomian Kabupaten Cirebon yang masih agraris, serta kebijaksanaan dan arah pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Cirebon sebagaimana yang tertuang dalam masterplan, Pola Dasar Pembangunan Daerah ataupun Repelita Daerah, maka tujuan kerjasama yang disepakati adalah selaras dengan kepentingan kedua belah pihak.

2. Penyusunan Program Kegiatan.

Program-program dan kegiatan yang dilakukan bersama pada umumnya berjalan lancar, walaupun program-program yang disepakati untuk dilaksanakan itu tidak senantiasa tertuang dalam bentuk perjanjian tersendiri, sebagaimana yang disyaratkan dalam Piagam Kerjasama pasal 3.

Pasal 3 Piagam tersebut menyebutkan bahwa "Pelaksanaan Kerjasama akan diatur dalam perjanjian tersendiri". Hal ini

berarti, bahwa setiap program kegiatan yang akan dilakukan bersama, mestinya diatur dalam perjanjian tersendiri secara tertulis, sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam pelaksanaannya.

Kemudian apabila dikaitkan dengan mekanisme perencanaan yang berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Cirebon, maka setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya (tahun anggaran 1 April s.d. 31 Maret tahun berikutnya), harus disiapkan dan diajukan rencananya pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sehingga segala sesuatu yang diperlukan bagi suksesnya pelaksanaan program/rencana kegiatan tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya.

Program-program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya bersifat sepihak artinya masing-masing membuat program sendiri-sendiri untuk kegiatan yang sama; tidak disusun bersama-sama. Kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan pendekatan secara lisan atau dalam bentuk surat-menyurat, tidak didukung dengan perjanjian khusus atau tersendiri. Hal demikian sesungguhnya cukup riskan, apabila ternyata dalam pelaksanaannya nanti timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan bersama atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak.

3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan Penunjangan Lintas Sektoral

Setiap kegiatan kerjasama dilakukan melalui koordinasi baik koordinasi oleh masing-masing pihak maupun koordinasi bersama-sama.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan suatu Tim Khusus dalam menangani suatu kegiatan kerjasama, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, dimana Ketua Bappeda ditunjuk sebagai Ketua Tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut. Dengan penetapan ini maka Tim yang ditunjuk harus dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu kepada Bupati Kepala Daerah.

Dalam upaya mensukseskan kegiatan kerjasama yang dilakukan, Tim melibatkan pula semua unsur dinas/instansi yang terkait baik dinas/instansi Daerah TK I dan TK II maupun dinas/instansi vertikal yang ada di Daerah TK II, para Pembantu Bupati, para Camat, para Kepala Desa, lembaga-lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan warga masyarakat pada umumnya, yang ada dalam wilayah yang dijadikan lokasi kegiatan tersebut. Hal ini kiranya tidak menyimpang dari isi Naskah Piagam Kerjasama sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4. Dengan demikian setiap kegiatan akan diketahui, diikuti dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, khususnya warga masyarakat setempat, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan oleh IPB melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan

motivasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang semakin besar terhadap pembangunan, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sendiri.

Dalam pada itu, bagi IPB koordinasi dilakukan melalui LPPM; tidak dibentuk tim khusus. Menyadari akan tugas dan tanggung jawab LPPM cukup luas dan berat, maka pelaksanaan koordinasi pada berbagai kegiatan dalam pengisian kerjasama kurang dilakukan secara intensif. Pembinaan, Pengendalian dan evaluasi kegiatan tidak dilakukan secara kontinyu.

4. Pembiayaan

Setiap program kegiatan yang dilakukan sedikit banyak memerlukan biaya. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 5 Naskah Piagam Kerjasama, pembiayaan dapat ditanggung bersama, atau seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga/Dinas/Instansi yang ada dibawah kekuasaannya, sedangkan IPB menyediakan tenaga-tenaga ahli dan alat-alat penelitian serta pendidikan/penyuluhan. Semuanya tergantung kepada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tersendiri. Namun karena perjanjian tersendiri sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan kerjasama selama ini pembiayaannya tidak diketahui oleh pihak satu terhadap pihak lainnya dan sebaliknya.

Suatu kesulitan yang secara rutin dialami setiap tahunnya terhadap penentuan jumlah biaya yang diperlukan untuk

membiayai program kegiatan kerjasama antara lain tidak diketahuinya program kerjasama yang jelas, jumlah biaya yang terinci, jadwal waktu kegiatan yang direncanakan, yang semestinya harus diketahui jauh-jauh sebelum proses penyusunan anggaran (APBD) untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan. Hal ini berkaitan dengan mekanisme penyusunan anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Keadaan demikian antara lain sebagai akibat dari tidak dituangkannya setiap program kerjasama dalam perjanjian tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Naskah Piagam Kerjasama.

Dari uraian-uraian di atas, walaupun secara umum pelaksanaan kegiatan kerjasama dilakukan dan berjalan lancar, berkat adanya saling pengertian yang baik antara kedua belah pihak, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Piagam Kerjasama tersebut, maka pelaksanaan kerjasama belum didukung dengan persyaratan-persyaratan formal sebagaimana mestinya. Ketidaksiplinan dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, menunjukkan kualitas manusia yang ditugasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerjasama itu masih perlu peningkatan.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu kiranya segala kegiatan yang dilakukan berpijak kepada ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

PENGISIAN, HASIL DAN MANFAAT KERJASAMA

Kalau diperhatikan secara keseluruhan, maka pengisian kegiatan kerjasama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Cirebon dengan IPB secara garis besar dapat dibedakan dalam:

- a. Pelaksanaan Program Kerjasama di bidang Penelitian dan Perencanaan.
- b. Pelaksanaan Program Kerjasama di bidang Pendidikan dan Latihan.
- c. Pelaksanaan Program Kerjasama di bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan.
- d. Pelaksanaan Program Kerjasama dibidang Kuliah Kerja Nyata.

Adapun secara lebih rinci program-program tersebut masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ad.a. Program kerjasama dibidang penelitian dan perencanaan
Beberapa kegiatan penelitian dan perencanaan yang dilakukan selama kerjasama berlangsung meliputi:

- (1) Penelitian dan perencanaan pembangunan desa terpadu.

Lokakarya di Kecamatan Plumbon pada tahun 1974, yang didahului dengan penelitian dan analisisnya, menghasilkan konsep Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) yaitu suatu sistim pembangunan desa terpadu yang meliputi satu wilayah kecamatan dalam rangka mempercepat pembangunan desa,

sehingga dapat meningkatkan klasifikasinya dari desa swadaya ke swakarya dan dari swakarya ke swasembada. Pada waktu itu Kecamatan Plumbon dijadikan Pilot Proyek dan sekarang sistim itu diterapkan di seruhuh wilayah Kabupaten Cirebon, bahkan diterapkan secara nasional.

Namun, IPB sebagai pengambil inisiatif yang melahirkan sistim UDKP tersebut, belakangan ini dirasakan kurang melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasinya secara terus menerus.

Berdasarkan data yang diperoleh, klasifikasi desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 1987/1988 (Pelita IV) adalah sebagai berikut:

- Desa Swadaya	:	buah (0 %)
- Desa Swakarsa	: 146	buah (34 %)
- Desa Swasembada	: 278	buah (66 %)

Jumlah	: 424	buah (100 %)

Sedangkan klasifikasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- LKMD Persiapan	:	buah (0 %)
- LKMD Kategori I	: 23	buah (5 %)
- LKMD Kategori II	: 69	buah (27 %)
- LKMD Kategori III	: 332	buah (78 %)

Jumlah	: 424	buah (100 %)

(2) Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Desa Pantai

Kabupaten Cirebon memiliki pantai sepanjang ± 54 Km, dan merupakan potensi perikanan yang cukup besar, tetapi belum dapat didayagunakan secara optimal bagi masyarakat pantai tersebut. Setelah dilakukan penelitian bersama yang seksama dianalisa dan kemudian di lokakaryakan pada tahun 1976, maka diperoleh rumusan kebijaksanaan yang patut ditempuh untuk mengembangkan sektor perikanan tersebut. Namun hingga sekarang, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya mengingat keterbatasan kemampuan, baik yang menyangkut perangkat keras, perangkat lunak serta kemampuan biaya yang sangat terbatas.

Keadaan yang demikian ini, pihak IPB kiranya kurang dapat menunjang terhadap pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut baik yang bersifat pembinaan, menarik partisipasi kepada pihak departemen/lembaga/instansi pusat maupun pihak swasta mengalokasikan dan menanamkan modalnya di sektor perikanan di Kabupaten Cirebon ini.

(3) Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Salah satu rumusan lokakarya Pembangunan Desa Pantai adalah perlu dibangunnya Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Cirebon, guna menunjang kelancaran

pendaratan perahu-perahu nelayan dan kapal-kapal penangkap ikan.

Penelitian untuk mencari lokasi pelabuhan dilakukan dengan melibatkan berbagai dinas/instansi terkait termasuk IPB dengan biaya yang cukup besar dari APBD Kabupaten Cirebon sendiri.

Dua alternatif lokasi yang tepat dan memenuhi persyaratan ditemukan yaitu Kanci dan Pengarengan (Kecamatan Astanajapura). Tetapi pada saat Pemerintah Pusat memprogramkan pembangunan pelabuhan ikan di Cirebon, ternyata lokasi yang ditetapkan jatuh ke wilayah Kotamadya Cirebon, walaupun menurut kenyataan yang obyektif lokasi tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Dengan demikian maka jelas, bahwa perencanaan yang hanya mendasarkan kepada data yang benar dan obyektif, serta kebutuhan yang mendesak, kiranya belum dapat menjamin pihak yang berwenang untuk menjatuhkan pilihannya. Faktor lain kadang-kadang lebih menentukan, walaupun setelah dibangun ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu IPB yang terlibat dalam penelitian dan perencanaan lokasi pelabuhan di Kabupaten Cirebon itu kiranya belum dapat menarik partisipasi Pemerintah Pusat yang berwenang.

Barangkali secara kebetulan, pada saat Pemerintah memprogramkan pembangunan pelabuhan kayu (Wood Centre) di Jawa Barat, Kanci telah terpilih sebagai lokasinya dan pembebasan tanahnya telah dilaksanakan, tetapi pembangunan fisiknya sampai sekarang belum dimulai.

(4) Penelitian dan Lokakarya Penanggulangan Masalah Sosial di wilayah Kecamatan Kapetakan

Kecamatan Kapetakan merupakan wilayah kecamatan yang kondisi sosialnya cukup rawan. Tetapi setelah dilakukan penelitian dan di lokakaryakan, diperoleh konsep-konsep yang akhirnya mampu merubah kondisi sosial masyarakat kearah lebih baik, sehingga dapat menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya di sektor perikanan (tambak udang). Penerapan sistim UDKP dan kehadiran KKN IPB di wilayah ini dalam beberapa periode, ikut membantu memberikan motivasi kepada masyarakat disini untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang positif dan konstruktif.

(5) Penelitian Pengembangan Irigasi Tambak Udang

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1984/1985 dengan mengikut sertakan pula Prosida telah direalisir pelaksanaannya di wilayah kecamatan Cirebon Utara, Babakan, Losari dan Kape-

takan. Perkembangan yang cukup pesat disektor pertambakan udang dewasa ini, Kiranya perlu Kehadiran IPB untuk melakukan pembinaan dan penataan, agar antara petani tambak besar dan modern dengan petani tambak kecil tradisional tidak berbenturan kepentingan, sehingga faktor-faktor yang dapat menimbulkan kembali kerawanan sosial dapat dicegah.

Dari berbagai kegiatan penelitian dan perencanaan yang digambarkan di atas, maka selain ada diantaranya yang dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga sebagian ada yang tidak terwujud. Tidak terwujudnya hasil-hasil penelitian dan perencanaan tersebut antara lain karena faktor manusianya sendiri yang belum mampu untuk menarik partisipasi dari berbagai kalangan yang terkait, disamping tidak mampu pula untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Ad.b. Pelaksanaan Program Kerjasama dibidang Pendidikan dan Latihan

Beberapa kegiatan pendidikan dan latihan yang dilakukan selama kerjasama antara lain:

- (1) Pendidikan dan latihan bagi kader-kader pembangunan desa se wilayah kecamatan Plumbon yang diselenggarakan pada tahun 1975, yang diikuti oleh

berbagai unsur masyarakat desa, perangkat pemerintah desa dan kecamatan serta dinas/instansi tingkat kecamatan.

Pendidikan dan latihan ini diselenggarakan dalam rangka menunjang pelaksanaan sistim pembangunan desa terpadu (UDKP) sebagaimana yang dihasilkan dalam lokakarya Plumbon. Wilayah kecamatan Plumbon sendiri pada waktu itu dinyatakan sebagai Pilot Proyek.

Keadaan klasifikasi desa di wilayah kecamatan Plumbon (setelah adanya pemekaran) saat ini menunjukkan 70 % adalah desa swasembada.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi aparatur perencana dan bagi para Camat, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- (3) Secara timbal balik, mengikut-sertakan kedua belah pihak dalam kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Panel dan semacamnya, yang semuanya dapat merupakan forum latihan untuk berani menyampaikan pendapat dan pikiran, menimba pengetahuan dan pengalaman orang lain, serta membuka wawasan berfikir yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Semua kegiatan yang dilakukan di atas, pada hakekatnya tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan manusia sebagai subyek pembangunan.

Ad.c. Pelaksanaan program kerjasama di bidang penerapan teknologi tepat guna

Teknologi merupakan suatu cara atau alat untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. Agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki masyarakat atau yang disebut teknologi tepat guna.

Beberapa teknologi tepat guna yang dilaksanakan dalam rangka mengisi kerjasama adalah di sektor pertanian, peternakan dan industri kecil.

Ad.d. Pelaksanaan Program Kerjasama di bidang KKN Mahasiswa

Program kerjasama dibidang KKN Mahasiswa IPB di Kabupaten boleh dikatakan sudah menjadi kegiatan rutin dan dapat berjalan lancar. Sampai saat ini tidak kurang dari 3.500 mahasiswa IPB yang ber-KKN di seluruh wilayah kecamatan dan tersebar dipeloksok pedesaan, yang ada di Kabupaten Cirebon.

Namun sampai berapa jauh hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan daerah dan pembangunan desa, kiranya belum

diadakan evaluasi atau penelitian secara khusus.

Perlu dimaklumi, bahwa mahasiswa yang ber-KKN di Kabupaten Cirebon bukan saja dari IPB tetapi juga dari berbagai Perguruan Tinggi lainnya yang ada di Jawa Barat. Dengan demikian dipandang perlu adanya penelitian khusus untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya program ini, apakah perlu terus dilanjutkan atau dihentikan atau bersifat insidental saja. Hal ini diperlukan tentunya untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Kejenuhan yang dirasakan masyarakat sebagai dampak ketidak berhasilan program ini membawa perubahan kondisi sosial ekonomi sebagaimana yang diharapkan, bukannya tidak mungkin akan menimbulkan preseden yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN USUL-USUL/SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Semua program dan kegiatan kerjasama yang dilakukan hingga saat ini masih dalam bentuk kegiatan non fisik, yang orientasinya kepada peningkatan kualitas manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan.
- b. Dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kerjasama, belum mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Piagam Kerjasama.
- c. Berbagai program dan kegiatan kerjasama, secara umum telah dapat dilaksanakan lancar, akan tetapi kiranya belum mampu mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak diikuti dengan program/kegiatan kerjasama lanjutannya.

2. Usul-usul/Saran-saran

- a. Pada dasarnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Cirebon - IPB masih perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Peningkatan yang dimaksud meliputi antara lain:
 - Penyusunan program/kegiatan kerjasama dilakukan bersama-sama dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Naskah Piagam Kerjasama.

- Program/kegiatan kerjasama lebih berorientasi kepada upaya untuk memecahkan berbagai masalah mendesak yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi dengan tetap dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Setiap program/kegiatan kerjasama hendaknya diusahakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.
 - Agar pelaksanaan program/kegiatan kerjasama dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar dan intensif perlu dibentuk Tim Koordinasi bersama atau Tim Koordinasi masing-masing pihak.
- b. Terhadap berbagai program dan kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan, selama periode tertentu perlu dilakukan evaluasi dan penelitian secara khusus, untuk mengetahui keberhasilan, kemanfaatan dan faktor-faktor yang menghambat sebagai umpan balik dalam perbaikan dan peningkatan kerjasama selanjutnya.

P E N U T U P

Makalah ini disusun berdasarkan informasi, pengetahuan, pengalaman dan pengamatan sepihak yaitu dari Kacamata Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Cirebon. Oleh karena itu, dari kacamata pihak lain yaitu IPB materi makalah yang disampaikan ini mungkin ada diantaranya yang kurang berkenan, bahkan mungkin pula ada yang keliru, salah atau tidak sesuai dengan kenyataan. Bila demikian, maka perlu kiranya makalah ini diperbaiki dan disempurnakan lebih lanjut, agar dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan hubungan kerjasama diwaktu-waktu mendatang. Untuk itu kami percayakan sepenuhnya kepada pihak IPB.